

RUU PEMILU

Golkar Usulkan Penyederhanaan Kursi

JAKARTA – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) telah menyelesaikan susunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satu usulan baru yang mereka gulirkan adalah ide penyederhanaan jumlah kursi untuk daerah pemilihan (dapil) DPR.

Kemarin tim kajian dan pembahasan RUU bidang politik Partai Golkar melakukan pertemuan dengan perwakilan Panitia Khusus (Pansus) Fraksi Partai Golkar untuk membahas DIM RUU Pemilu. "Kami ingin kursi disederhanakan, tidak lagi 3-10 kursi per dapil, tapi cukup menjadi 3-6 kursi," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham setelah pertemuan di ruang Fraksi Partai Golkar DPR. Dengan penyederhanaan itu, konsekuensinya adalah pemekaran atau penambahan jumlah dapil. Jumlah kabupaten/kota dalam satu dapil pun berkurang.

Terkait penyederhanaan kursi, anggota Pansus RUU Pemilu Agun Gunanjar Sudarsa menjelaskan, ide itu diputuskan atas pertimbangan penyerapan aspirasi. Dengan komposisi dapil saat ini, ditambah angka pemekaran yang telah berlangsung, satu anggota dewan harus menampung aspirasi dapil dengan jumlah kabupaten/kota yang banyak. "Misalkan di (dapil) Sumatera Utara, bisa mencakup 10 sampai 12 kabupaten kota," kata Agun.

Jumlah tersebut tentu tidak ideal untuk penyerapan aspirasi. Anggota dewan memiliki waktunya terbatas untuk mengunjungi dapil, belum termasuk biaya yang dikeluarkan. Karena itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan adanya penyederhanaan jumlah kursi demi mempermudah cakupan dapil.

Selain penyederhanaan kursi, Fraksi Partai Golkar menyampaikan sejumlah usulan lain. Menurut Idrus, Fraksi Partai Golkar mengusulkan penambahan waktu tahapan pemilu, dari 22 bulan menjadi 24 bulan. Ide itu mirip dengan usul yang disampaikan panglima TNI dalam rapat dengar pendapat bersama Pansus RUU Pemilu. "Ini pemilu serentak pertama, pasti banyak masalah. Bebannya juga banyak sehingga pengelolaan tahapan minimal 24 bulan," kata Sekjen Golkar dua periode tersebut.

Tak lupa, Fraksi Partai Golkar juga konsisten pada usulan terkait perubahan sistem proporsional dari terbuka menjadi tertutup. Untuk merealisasikan usulan itu, mereka akan melobi partai lain dan berkonsultasi ke MK. Sebab, dulu MK pernah membantalkan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka. "Kami akan mempelajari konstruksi putusan (MK) terdahulu. Kami tidak ingin ini dibawa lagi ke MK," ujarnya. (bay/c17/fat)



RINCI: Ketua Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham memimpin rapat pembahasan daftar isian masalah RUU pemilu kemarin.

Debat Kandidat Wajib Bisa Diakses

Respons KPU terhadap Daerah yang Pindah Lokasi Debat

JAKARTA – Meski diperbolehkan menggelar debat kandidat di luar daerah penyelenggara pilkada, KPU RI meminta KPU di daerah mempertimbangkan secara matang hal tersebut. Harapannya, pemindahan lokasi debat tidak berdampak pada sulitnya akses masyarakat setempat memperoleh informasi.

Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan, secara prinsip, debat kandidat dilakukan agar masyarakat tahu gagasan yang diusung pasangan calon yang maju di daerah masing-masing. Untuk itu, aspek ketersebaran informasi menjadi hal yang harus diutamakan. "Kalau pilkada Papua bikin debat di Jakarta, ya harus jelas pertimbangannya. Harus ada alasan kenapa tidak di sana saja agar mudah

diakses masyarakat sekitar," ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (6/1).

Karena itu, lanjut Ferry, pemindahan lokasi baru bisa dilakukan jika hal tersebut diambil dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat. "Mungkin masyarakat akan dapat informasi yang lebih luas ketika itu disiarkan di Jakarta. Itu harus dipertimbangkan," imbuhnya.

Debat antarcalon gubernur Papua Barat merupakan salah satu debat yang direncanakan dilakukan di luar daerah. Tak tanggung-tanggung, KPU setempat menjadikan Jakarta sebagai lokasi digelarnya debat kandidat. Selain Papua Barat, sejumlah daerah merencanakan debat di luar daerah. Di antaranya, pilkada Kota Cimahi dan Kabupaten Takalar.

Selain itu, lanjut Ferry, KPU daerah harus mempertimbangkan aspek ketersediaan anggaran. Dia meminta kebutuhan prinsip pilkada lainnya tidak terganggu dengan pemindahan lokasi yang membutuhkan tambahan anggaran. Sebab, sudah pasti pemindahan lokasi debat berdampak pada

PILKADA YANG PINDAH LOKASI DEBAT

Kabupaten Takalar (Sulsel) menggelar debat kandidat di Kota Makassar. Alasannya, tidak ada gedung yang memungkinkan di Takalar untuk dijadikan tempat debat kandidat. Alasan lain adalah faktor keamanan.

Kabupaten Papua Barat menggelar debat di Jakarta. Alasannya, terlalu mahal untuk memboyong stasiun televisi swasta ke Papua Barat.

Karena itu, para kandidat yang diboyong ke Jakarta.

Kota Cimahi punya opsi menggelar debat kandidat di luar kota tersebut. Rencananya, debat dilaksanakan 20 Januari. Namun, hingga kemarin belum diputuskan lokasinya.

GRAFIS: ERIE DINI/JAWA POS

membengaknya anggaran.

Mantan ketua KPU Jawa Barat itu juga menegaskan, di tempat yang menjadi lokasi acara debat, panitia wajib menggandeng media elektronik yang bisa diakses masyarakat di wilayahnya. "Kalau tidak, ya hanya orang di satu ruangan itu saja yang tahu," tuturnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, debat kandidat sebaiknya dilakukan di daerah masing-masing. Tidak hanya menyemarakkan di daerahnya, tetapi juga ada keterlibatan pemangku kepentingan di daerah. "Kalau di luar wilayah, pasti akan ada keterbatasan akses pemangku kepentingan daerah. Belum lagi *kan biaya* yang harus dikeluarkan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Titi, harus dihindari pemindahan lokasi debat hanya dilakukan demi prestise. "Yang diutamakan adalah penjangkauan audiens pemilih di wilayah yang melakukan pilkada," kata Titi. (far/c17/fat)



HENDRA EKA/JAWA POS

SINDIR PEMERINTAH: Lepas Tangan, Tanda Pemerintah Ada Persoalan

FPKS Sentil PP Kenaikan Biaya BPKB dan STNK

JAKARTA – Keputusan pemerintah untuk menaikkan biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) menuai protes publik. Namun, respons Presiden Joko Widodo bersama jajarannya justru terkesan lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab atas keluarnya peraturan pemerintah (PP) tersebut. Situasi itu menunjukkan adanya

persoalan di internal pemerintah.

Sinyalemen tersebut dilontarkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (6/1). Dia menyatakan, atas kebijakan kenaikan biaya STNK dan BPKB yang mencapai tiga kali lipat, termasuk kenaikan tarif dasar listrik, Fraksi PKS meminta pemerintah melakukan evaluasi. "Kami minta kebijakan itu ditinjau ulang, dievaluasi, bahkan dicabut," katanya.

Jazuli menjelaskan, kenaikan biaya BPKB dan STNK mungkin tidak menjadi masalah bagi mereka yang memiliki mobil mewah.

Namun, mayoritas yang terkena dampaknya adalah pengguna sepeda motor. Sebagian di antaranya menggunakan sepeda motor untuk menaikkan diri. "PKS berharap ini tidak diberlakukan pada mereka yang punya sepeda motor. Ini akan memberatkan," ujarnya.

Apalagi, setelah PP itu muncul, lanjut dia, suara di internal pemerintah justru terkesan lepas tanggung jawab. Presiden Jokowi mempertanyakan munculnya PP tersebut, termasuk menteri keuangan dan Kapolri yang tidak merasa mengejutkan kebijakan itu.

"Kalau keputusan yang membuat tidak

nyaman, lalu angkat tangan dari tanggung jawab, ini menunjukkan ada persoalan," sentil legislator dari daerah pemilihan Banten III itu.

Jika disebut bahwa kebijakan kenaikan biaya BPKB dan STNK pernah disetujui Badan Anggaran DPR, Jazuli juga membantah hal itu. Menurut dia, rapat banggar tidak pernah mengambil keputusan spesifik terkait dengan kenaikan biaya BPKB dan STNK yang masuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP). "Di pembahasan DPR, tidak ada kalimat naik tiga kali lipat atau naik 300 persen," tandasnya. (bay/c5/fat)

OTONOMI UPDATE

Tantangan Daerah di Balik Naiknya Dana Transfer Umum

Transparansi, Dorong Sikat Perburuan Rente

Transfer Pusat vs Tantangan Daerah

Dana Transfer Umum

APBN 2015	Rp 480,6 triliun	APBN 2016	Rp 491,5 triliun (naik Rp 10,9 triliun)	APBN 2017	Rp 503,6 triliun (naik Rp 12,1 triliun)	Alokasi Dana Desa 2015–2017	Rp 116 triliun
-----------	------------------	-----------	---	-----------	---	-----------------------------	----------------

Kemiskinan di Atas Rata-Rata (%)

Kemiskinan nasional 10,86

Papua	28,54
Papua	25,43
Barat	
NTT	22,19
Maluku	19,18
Gorontalo	17,72
Bengkulu	17,32
Aceh	16,73
NTB	16,48
Sulawesi	14,45



Kontribusi Pajak dan Transfer

Jawa	Papua dan Maluku	Kalimantan	Sumatera
Rp 737 triliun (81%)	Rp 4,7 triliun; transfer	Rp 11 triliun; transfer	Rp 25 triliun; transfer

Tantangan Pertanian

Pertumbuhan pertanian	2016	2017
4,64%		2,67% (triwulan ketiga)

GRAFIS: RIZKY JANU/JAWA POS

masarakat), tetapi juga dari sisi penawaran melalui peningkatan kapasitas dan kualitas produksi. Memang pemerintahan harus diungkap dengan membayar gaji pegawai, tetapi diharapkan persentase untuk modal membangun mestinya makin tinggi.

Ketiga, efektivitas DTU belum teruji dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Hampir separuh dari seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang berada di atas tingkat kemiskinan nasional, yaitu 10,86 persen. Berdasar data BPS 2016, terdapat 15 provinsi yang memiliki kemiskinan yang melebihi tingkat kemiskinan nasional. Yakni, Papua (28,54 persen), Papua Barat (25,43 persen), NTT (22,19 persen), Maluku (19,18 persen), Gorontalo (17,72 persen), Bengkulu (17,32 persen), NAD (16,73 persen), NTB (16,48 persen), Sulawesi Tengah (14,45 persen), Lampung (14,29 persen), Sumatera Selatan (13,54 persen), Jawa Tengah (13,34 persen), Jawa (13,27 persen), Timur (12,05 persen), Sulawesi Barat (11,74 persen), dan Sulawesi Selatan (10,86 persen).

Terkhusus luar Jawa yang perlu dikebut pembangunannya adalah Papua, Papua Barat, dan Maluku. Ketimpangan masih sangat terasa dalam penerimaan pajak. Menurut Sri Mulyani di Semarang akhir tahun lalu, Jawa masih menyumbang 81 persen atau Rp 737 triliun. Sedangkan Papua dan Maluku hanya 1,6 persen atau setara Rp 4,7 triliun. Padahal, daerah itu ditransfer Rp 144,7 triliun. Sedangkan Kalimantan menyumbang Rp 11 triliun, ditransfer Rp 70,9 triliun. Sumatera menyumbang Rp 25 triliun, mendapat transfer Rp 207 triliun.

Untuk itu, perlu adanya langkah perbaikan model transfer daerah (khususnya DTU) agar fiskal daerah menjadi tangguh. Di antaranya adalah, pertama, DTU seharusnya hanya ditujukan untuk menutupi *fiscal gap*, bukan semata sebagai sumber pembiayaan untuk membiayai pengeluaran rutin (seperti: belanja pegawai). Kedua, selain peningkatan DTU, pemerintahan Jokowi-JK harus meningkatkan alokasi dana transfer khusus (DTK) untuk sektor-sektor yang produktif, terutama untuk

pembangunan infrastruktur sesuai potensi ekonomi wilayah.

Ketiga, peningkatan DTU juga harus disertai dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas penganggaran. Segala proposal yang masuk terkait program DTU harus dapat diakses publik dan prosesnya dilakukan secara transparan. Sebagaimana digarisbawahi INDEF, dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, segala bentuk praktik perburuan rente dalam proses pembahasan alokasi anggaran DTU dapat dihapus ataupun dikurangi. Sejauh ini, perburuan rente tersebut masihjadi bahan laten, meski KPK beberapa kali melakukan penangkapan (termasuk pada orang-orang DPR). Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli juga belum menunjukkan taringnya menyentuh "kejahatan sistemik" itu.

Momen besarnya kucuran DTU yang dialokasikan pemerintahan Jokowi-JK pada APBN 2017 kali ini harus dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di antaranya adalah mengembangkan eksploitasi industri alternatif (seperti: pariwisata atau UMKM) sebagai pendamping dari industri utamanya. Pelajaran berharga dapat diambil dari pengalaman Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi yang pertumbuhan ekonominya mayoritas disokong dari hasil industri eksploitasi sumber daya alam (seperti: minyak, gas, batu bara). Ketika harga komoditas energi "terjun bebas", pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, seperti dicatat BPS 2016, hingga mencapai rata-rata -0,8 persen pada 2016.

Selain itu, daerah harus mampu mendorong

desentralisasi. Yaitu, memindahkan proses pembuatan kebijakan dari pusat ke daerah. Dengan komitmen pengalokasian DTU yang setiap tahun meningkat, secara otomatis akan memberikan ruang fleksibilitas kepada pemerintah untuk menggunakan dana tersebut untuk pembangunan daerah.

Namun, di balik besarnya komitmen Jokowi-JK dalam mewujudkan Nawacita yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran (baca: daerah) Pusat "mengalah" dengan menurunkan pengeluaran pemerintah untuk belanja kementerian/lembaga (K/L). Jika pada APBN 2016 pengeluaran pemerintah dialokasikan sebesar Rp 784,1 triliun, pada APBN 2017 ini terjadi penurunan menjadi Rp 763,6 triliun (terutama sekitar Rp 20,5 triliun).

Posisi DTU dalam kaitannya dengan daerah sangatlah strategis. Sebab, pengalokasian DTU pada dasarnya mengikuti prinsip dasar

dan APBN 2016 sebesar Rp 102,1 triliun. Bila tiba-tiba harga minyak di pasar dunia naik (kini di level USD 56 per barel, padahal patokan APBN USD 45 per barel), sangat memungkinkan DTU itu kena potong. Daerah (juga K/L) punya pengalaman kecut tersebut tahun lalu ketika Menkeu Sri Mulyani yang baru dil